



Tipologi Klassen Dua Tingkat dalam Pemetaan Ketimpangan Regional dan Potensi Sektoral Provinsi Tertinggal di Indonesia

Debby Nindya Istiandari^{1*}, Lailatul Musyarofah²

¹⁻²Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: debby.nindya@uinsa.ac.id¹, laimusyarof21@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: debby.nindya@uinsa.ac.id

Abstract. *Regional economic development in Indonesia during the 2024–2025 transition period faces spatial growth polarization and fiscal autonomy challenges. This study aims to map national macro-level regional disparities while deconstructing the internal sectoral potential of a relatively underdeveloped province. A descriptive quantitative approach was applied using a Two-Stage Klassen Typology Analysis, utilizing Gross Regional Domestic Product (GRDP) data at Constant Market Prices for 2024–2025 from Statistics Indonesia. The first-stage macro analysis reveals that among 38 provinces, the distribution is categorized into 5 provinces in Quadrant I, 7 in Quadrant II, 16 in Quadrant III, and 10 in Quadrant IV, where West Nusa Tenggara is identified as relatively underdeveloped. The second-stage analysis critically detects seven potential sectors clustering in Sectoral Quadrant III, including Manufacturing Industry, Construction, and Accommodation-Food Service Activities. These sectors reflect hidden engines of growth accelerating progressively despite their limited absolute contributions. The study recommends that local governments implement a sectoral-targeted push policy by optimizing local budget allocations and investment facilitation on these potential sectors to accelerate regional convergence.*

Keywords: *Development Economics; Klassen Typology; Regional Disparity; Sectoral Potential; Underdeveloped Province.*

Abstrak. Pembangunan ekonomi regional di Indonesia pada periode transisi 2024–2025 dihadapkan pada tantangan polarisasi spasial dan tuntutan kemandirian fiskal. Penelitian ini bertujuan memetakan ketimpangan makro nasional sekaligus mendekonstruksi struktur potensi sektoral internal provinsi relatif tertinggal. Pendekatan kuantitatif deskriptif diterapkan melalui Analisis Tipologi Klassen Dua Tahap menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode 2024–2025 dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis tahap pertama menunjukkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, sebaran wilayah terbagi ke dalam 5 provinsi di Kuadran I, 7 provinsi di Kuadran II, 16 provinsi di Kuadran III, dan 10 provinsi di Kuadran IV, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat teridentifikasi sebagai daerah relatif tertinggal. Analisis tahap kedua pada perekonomian internal Nusa Tenggara Barat secara kritis mendeteksi tujuh sektor potensial di Kuadran III Sektoral, seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Penyediaan Akomodasi-Makan Minum. Sektor-sektor ini mencerminkan *hidden engines of growth* yang tumbuh progresif namun kontribusinya masih terbatas. Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah adalah menerapkan kebijakan pendorong sektoral terarah (*sectoral targeted push policy*) melalui penguatan alokasi fiskal APBD dan kemudahan investasi pada ekosistem sektor potensial tersebut demi mempercepat konvergensi regional.

Kata kunci: Disparitas Regional; Ekonomi Pembangunan; Potensi Sektoral; Provinsi Tertinggal; Tipologi Klassen.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi regional di Indonesia memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan struktural pada periode transisi tahun 2024–2025. Sebagai fase krusial estafet kepemimpinan nasional dan titik awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, arah kebijakan ekonomi makro difokuskan pada transformasi struktural demi mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Meskipun agregat pertumbuhan ekonomi nasional pasca-pandemi menunjukkan tren pemulihan yang cukup stabil di kisaran 5,0% hingga 5,2% pada

tahun 2024, capaian makro tersebut masih menyimpan persoalan ketimpangan spasial (*spatial disparity*) yang belum terselesaikan secara mendasar. Sejalan dengan hukum pertumbuhan regional oleh Myrdal, polarisasi ekonomi atau efek penyerapan (*backwash effect*) modal, investasi, dan tenaga kerja terdidik masih terpusat kuat di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia yang ditopang oleh aglomerasi industri matang (Sjafrizal, 2018; Todaro & Smith, 2020). Akibatnya, wilayah timur Indonesia dan daerah kepulauan lainnya masih menghadapi kendala besar dalam mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas fiskal mereka.

Dinamika perekonomian daerah pada koridor 2024–2025 kian kompleks akibat tingginya ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga komoditas ekspor andalan, serta implementasi penuh alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi terbaru ini secara fundamental menuntut kemandirian fiskal dan memaksa pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi internalnya secara mandiri (Kementerian Keuangan RI, 2023). Konsekuensinya, daerah yang hanya mengandalkan struktur ekonomi monolitik atau gagal melakukan diversifikasi sektoral cenderung terperosok ke dalam jebakan pertumbuhan rendah (*low-growth trap*). Sebaliknya, daerah yang adaptif mampu memicu akselerasi pertumbuhan yang progresif, yang pada gilirannya memperlebar jurang disparitas pendapatan per kapita sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis U-Terbalik Kuznets terkait fenomena divergensi spasial pada fase awal pembangunan (Jhingan, 2012). Untuk memetakan kondisi ketimpangan ini secara objektif, diperlukan evaluasi berkala terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai refleksi nyata dari kapasitas ekonomi riil tiap provinsi (Badan Pusat Statistik, 2025).

Dalam khazanah studi ekonomi regional, alat analisis klasik yang secara konsisten terbukti valid untuk memetakan kinerja wilayah adalah Metode Tipologi Klassen. Alat analisis ini mengklasifikasikan wilayah ke dalam empat kuadran utama, yaitu daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth, high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income, low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth, low income*), serta daerah relatif tertinggal (*low growth, low income*) (Hardiani & Lubis, 2017; Rahayu et al., 2023). Kendati demikian, mayoritas literatur empiris terdahulu yang memanfaatkan metode ini memiliki keterbatasan horizon waktu yang umumnya menggunakan data di bawah tahun 2023 (misalnya, Jatmiko, 2021; Pratama, 2022). Dengan demikian, studi-studi terdahulu belum mampu menangkap konsekuensi dari shock ekonomi, pergeseran struktural, dan realitas spasial terbaru yang terjadi

pada dinamika transisi tahun 2024–2025. Di samping itu, kelemahan mendasar dari sebagian besar penelitian ekonomi regional adalah kecenderungannya yang hanya berhenti pada tahap klasifikasi wilayah makro tanpa melakukan identifikasi lanjutan yang mendalam (*deep-dive*) pada wilayah yang masuk kategori tertinggal tersebut (Suryana, 2019). Implikasinya, rekomendasi kebijakan yang dilahirkan sering kali bersifat generik (*one-size-fits-all*), seperti imbauan meningkatkan nilai investasi secara umum tanpa kejelasan klaster atau sektor spesifik mana yang memegang peran sebagai katup penyelamat ekonomi lokal.

Guna mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan Tipologi Klassen Dua Tahap (*Two-Stage Klassen Typology*) pada horizon waktu 2024–2025. Tahap pertama dioperasikan pada level makro untuk mengklasifikasikan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita guna menyaring provinsi-provinsi yang terjebak di Kuadran IV (Relatif Tertinggal). Selanjutnya, tahap kedua mengadopsi modifikasi metode Klassen Sektoral untuk membedah 17 sektor lapangan usaha secara spesifik di dalam provinsi yang terkategori relatif tertinggal, berdasarkan kombinasi laju pertumbuhan sektor dan kontribusinya terhadap total PDRB (Dangi & Rauf, 2023; Himmah & Utami, 2025). Langkah dekonstruksi sektoral ini sangat krusial untuk mendeteksi *hidden engines of growth*, yaitu sektor ekonomi potensial (Kuadran III Sektoral) yang saat ini pangsa pasarnya masih marginal namun melaju dengan pertumbuhan progresif di atas rata-rata internal wilayahnya. Dengan mengenali sektor potensial ini, pemerintah daerah di provinsi tertinggal dapat melakukan efisiensi fiskal yang presisi melalui strategi sektoral *pushing policy*, insentif regulasi, dan pengarahan investasi ke sektor yang memiliki nilai pengganda (*multiplier effect*) terbesar. Hasil akhir riset ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi empiris yang mutakhir bagi pengayaan literatur ekonomi pembangunan di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan taktis bagi para pemangku kebijakan daerah demi mengikis disparitas spasial menuju pemerataan ekonomi nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis mengenai disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah berakar pada teori pertumbuhan regional klasik dan modern. Berdasarkan teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) yang dikembangkan oleh Perroux, pembangunan ekonomi tidak terjadi di semua tempat secara serentak, melainkan muncul di titik-titik tertentu dengan intensitas yang berbeda, yang kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya (Sjafrizal, 2018). Namun demikian, konsentrasi modal dan investasi pada kutub pertumbuhan sering kali memicu fenomena polarisasi spasial yang persisten. Myrdal menjelaskan kondisi ini melalui konsep *cumulative*

causation, di mana wilayah maju akan terus menarik faktor produksi dari wilayah belakang (*hinterland*) melalui efek penyerapan (*backwash effect*) yang lebih kuat daripada efek sebar (*spread effect*), sehingga memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks wilayah berkembang, hipotesis U-Terbalik Kuznets mengonfirmasi bahwa pada tahap awal pembangunan, divergensi ekonomi spasial cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita nasional, sebelum akhirnya mencapai titik jenuh dan bergerak menuju konvergensi pada tahap pembangunan yang lebih matang (Jhingan, 2012; Suryana, 2019).

Untuk mengukur dan mengklasifikasikan derajat ketimpangan serta performa makro ekonomi regional tersebut, Metode Tipologi Klassen menjadi instrumen evaluasi yang sangat valid dan diakui secara luas dalam literatur ekonomi pembangunan. Metode ini menggabungkan dua indikator utama pembangunan ekonomi, yaitu indikator kemakmuran daerah yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan indikator dinamika ekonomi yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (Hardiani & Lubis, 2017). Melalui persilangan kedua variabel ini terhadap rata-rata wilayah acuan (*benchmark* nasional), kinerja perekonomian daerah dipetakan secara rigid ke dalam empat kuadran yang berbeda, mulai dari daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth, high income*) hingga daerah relatif tertinggal (*low growth, low income*) (Kuncoro, 2014; Tambunan, 2014). Pengelompokan ini memberikan landasan empiris bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi efektivitas alokasi dana transfer daerah dalam mereduksi ketimpangan pembangunan (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Meskipun klasifikasi makro Tipologi Klassen efektif untuk memetakan disparitas spasial, intervensi kebijakan yang presisi pada daerah tertinggal memerlukan dekonstruksi struktur ekonomi pada tingkat meso, yaitu analisis potensi sektoral. Berdasarkan teori basis ekonomi (*economic base theory*), pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh kinerja sektor basis yang mampu mengeksplorasi keunggulan komparatifnya untuk mengeksport barang dan jasa keluar batas wilayahnya, sehingga mendatangkan aliran modal masuk (*inflow of capital*) yang memicu *multiplier effect* bagi perekonomian lokal (Tarigan, 2019). Modifikasi Metode Tipologi Klassen Sektoral hadir untuk melengkapi keterbatasan analisis basis tradisional dengan cara membandingkan pangsa kontribusi sektor dan akselerasi pertumbuhan sektor tersebut terhadap agregat internal daerahnya (Dangi & Rauf, 2023). Sektor yang teridentifikasi berada pada Kuadran III Sektoral (Sektor Potensial/Berkembang) memiliki urgensi tertinggi dalam formulasi kebijakan karena mencerminkan adanya *hidden engines of growth* (Himmah & Utami, 2025). Sektor-sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat agresif meskipun

pangsa pasarnya saat ini masih marginal, sehingga pemberian stimulus fiskal yang terarah (*sectoral targeted strategy*) pada kuadran tersebut akan menghasilkan daya dorong ekonomi yang optimal bagi wilayah yang relatif tertinggal (Pratama, 2022; Rahayu et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada analisis makro ekonomi regional dan analisis struktur sektoral. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtunan waktu (*time series*) untuk periode analisis tahun 2024 dan 2025. Sumber data otoritatif diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha (17 sektor) tingkat provinsi, data Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta data jumlah penduduk untuk perhitungan pendapatan per kapita (Badan Pusat Statistik, 2025; Kementerian Keuangan RI, 2024). Penggunaan data berbasis harga konstan ditujukan untuk mengeliminasi pengaruh inflasi sehingga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil secara objektif (Sjafrizal, 2018). Cakupan wilayah analisis dalam tahapan makro melibatkan seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan pembagian administratif terbaru, sedangkan wilayah nasional digunakan sebagai wilayah acuan atau *benchmark*.

Operasionalisasi analisis dilakukan dalam dua tahap matematis yang sistematis dengan menerapkan Modifikasi Analisis Tipologi Klassen (Kuncoro, 2014). Tahap pertama adalah klasifikasi makro wilayah untuk memetakan performa ekonomi seluruh provinsi ke dalam empat kuadran pertumbuhan (Hardiani & Lubis, 2017). Variabel makro yang dianalisis adalah laju pertumbuhan ekonomi provinsi (si), laju pertumbuhan ekonomi nasional (sn), PDRB per kapita provinsi (yi), dan PDB per kapita nasional (yn).

Matriks klasifikasi makro wilayah ditentukan berdasarkan kriteria berikut: Kuadran I melambangkan Daerah Maju dan Cepat Tumbuh (*high growth, high income*) yang terbentuk apabila $si \geq sn$ dan $yi \geq yn$. Kuadran II melambangkan Daerah Maju tapi Tertekan (*high income, low growth*) apabila $si < sn$ dan $yi \geq yn$. Kuadran III melambangkan Daerah Berkembang Cepat (*high growth, low income*) apabila $si \geq sn$ dan $yi < yn$. Sementara itu, Kuadran IV melambangkan Daerah Relatif Tertinggal (*low growth, low income*) apabila memenuhi kriteria $si < sn$ dan $yi < yn$ (Tambunan, 2014). Adapun Matriks Tipologi Klassen yang digunakan pada tahap pertama ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks Klasifikasi Wilayah Makro Berdasarkan Tipologi Klassen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (s)	PDRB per Kapita Tinggi ($y_i \geq y_n$)	PDRB per Kapita Rendah ($y_i < y_n$)
Pertumbuhan Tinggi ($s_i \geq s_n$)	Kuadran I Daerah Maju dan Cepat Tumbuh	Kudaran III Daerah Berkembang Cepat
Pertumbuhan Rendah ($s_i < s_n$)	Kuadran II Daerah Maju tapi Tertekan	Kuadran IV Daerah Relatif Tertinggal

Sumber: Kuncoro (2014); Tambuhan (2014), diolah.

Tahap kedua difokuskan secara eksklusif pada provinsi yang teridentifikasi masuk ke dalam Kuadran IV (Relatif Tertinggal) pada tahapan pertama. Untuk mengidentifikasi potensi ekonomi internal pada wilayah tertinggal tersebut, diterapkan metode Analisis Tipologi Klassen Sektoral (Dangi & Rauf, 2023; Himmah & Utami, 2025). Analisis ini membandingkan kinerja sektoral tingkat provinsi terhadap agregat ekonomi internal di provinsi itu sendiri menggunakan indikator: Laju pertumbuhan sektor k pada provinsi i (g_{ki}), laju pertumbuhan PDRB total provinsi i (g_i), kontribusi atau pangsa pasar sektor k terhadap total PDRB provinsi i (s_{ki}), dan rata-rata kontribusi sektor k pada tingkat wilayah nasional (s_k). Adapun matriks Tipologi Klassen yang digunakan pada tahap kedua adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Matriks Klasifikasi Potensi Sektoral Wilayah Berdasarkan Tipologi Klassen.

Laju Pertumbuhan Sektor (g)	Kontribusi Sektor Tinggi ($s_{ki} \geq s_k$)	Kontribusi Sektor Rendah ($s_{ki} < s_k$)
Pertumbuhan Cepat ($g_{ki} \geq g_i$)	Kuadran I Sektor Unggulan / Prima	Kudaran III Sektor Potensial / Berkembang
Pertumbuhan Lambat ($g_{ki} < g_i$)	Kuadran II Sektor Jenuh / Tertekan	Kuadran IV Sektor Tertinggal

Sumber: Dangi & Rauf (2023); Tarigan (2019), diolah.

Penetapan klasifikasi potensi sektoral didasarkan pada kriteria matriks dua dimensi. Sektor Unggulan atau Prima (Kuadran I Sektoral) terbentuk jika sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi ($g_{ki} \geq g_i$ dan $s_{ki} \geq s_k$). Sektor Potensial atau Berkembang (Kuadran II Sektoral) didefinisikan sebagai sektor dengan laju pertumbuhan tinggi namun kontribusinya masih rendah ($g_{ki} \geq g_i$ dan $s_{ki} < s_k$). Sektor Jenuh atau Tertekan (Kuadran III Sektoral) dicirikan oleh kontribusi yang besar tetapi laju pertumbuhannya melambat ($g_{ki} < g_i$ dan $s_{ki} \geq s_k$). Terakhir, Sektor Tertinggal (Kuadran IV Sektoral) merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan serta kontribusi di bawah rata-rata kinerja ekonomi provinsi tersebut ($g_{ki} < g_i$ dan $s_{ki} < s_k$) (Kuncoro, 2014; Tarigan, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Tipologi Klassen Tahap Pertama

Analisis Tipologi Klassen tahap pertama dilakukan terhadap 38 provinsi di Indonesia untuk mengidentifikasi karakteristik perekonomian masing-masing wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita dibandingkan dengan indikator nasional. Hasil klasifikasi tersebut digunakan untuk mengelompokkan provinsi ke dalam empat kategori, yaitu Kuadran I (daerah maju dan cepat tumbuh), Kuadran II (daerah maju tetapi tertekan), Kuadran III (daerah berkembang cepat), dan Kuadran IV (daerah relatif tertinggal). Setelah dilakukan analisis berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, maka hasil klasifikasi provinsi di Indonesia berdasarkan analisis Tipologi Klassen tahap pertama adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Tipologi Klassen Tahap Pertama.

No.	Provinsi	si (Persen)	sn (Persen)	PDRB per Kapita (Rupiah)	PDB per Kapita Nasional (Rupiah)	Kuadran	Kategori
1	Aceh	2.97	5.11	45,770,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
2	Sumatera Utara	4.53	5.11	78,310,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
3	Sumatera Barat	3.37	5.11	59,549,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
4	Riau	4.79	5.11	176,385,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
5	Jambi	4.93	5.11	92,786,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
6	Sumatera Selatan	5.35	5.11	80,663,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
7	Bengkulu	4.80	5.11	52,305,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
8	Lampung	5.28	5.11	55,009,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
9	Kep. Bangka Belitung	4.09	5.11	75,323,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
10	Kep. Riau	6.94	5.11	172,459,000	83,700,000	I	Maju dan cepat tumbuh
11	DKI Jakarta	5.21	5.11	367,687,000	83,700,000	I	Maju dan cepat tumbuh
12	Jawa Barat	5.32	5.11	59,865,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
13	Jawa Tengah	5.37	5.11	50,824,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
14	DI Yogyakarta	5.49	5.11	55,039,000	83,700,000	III	Berkembang cepat

15	Jawa Timur	5.33	5.11	80,856,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
16	Banten	5.37	5.11	74,673,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
17	Bali	5.82	5.11	72,658,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
18	Nusa Tenggara Barat	3.22	5.11	33,667,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
19	Nusa Tenggara Timur	5.14	5.11	25,837,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
20	Kalimantan Barat	5.39	5.11	56,984,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
21	Kalimantan Tengah	4.80	5.11	84,730,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
22	Kalimantan Selatan	5.22	5.11	70,577,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
23	Kalimantan Timur	4.53	5.11	208,331,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
24	Kalimantan Utara	4.56	5.11	208,210,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
25	Sulawesi Utara	5.66	5.11	75,235,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
26	Sulawesi Tengah	8.47	5.11	131,643,000	83,700,000	I	Maju dan cepat tumbuh
27	Sulawesi Selatan	5.43	5.11	78,748,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
28	Sulawesi Tenggara	5.79	5.11	72,031,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
29	Gorontalo	5.71	5.11	47,477,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
30	Sulawesi Barat	5.36	5.11	46,654,000	83,700,000	III	Berkembang cepat
31	Maluku	4.56	5.11	33,652,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
32	Maluku Utara	34.17	5.11	97,262,000	83,700,000	I	Maju dan cepat tumbuh
33	Papua Barat	6.46	5.11	139,213,000	83,700,000	I	Maju dan cepat tumbuh
34	Papua Barat Daya	4.03	5.11	61,624,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
35	Papua	3.97	5.11	84,305,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
36	Papua Selatan	3.39	5.11	64,928,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal
37	Papua Tengah	-21.80	5.11	107,566,000	83,700,000	II	Maju tetapi tertekan
38	Papua Pegunungan	3.75	5.11	19,111,000	83,700,000	IV	Relatif tertinggal

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian (2026)

Berdasarkan hasil klasifikasi, sebanyak 5 provinsi masuk dalam Kuadran I, 7 provinsi dalam Kuadran II, 16 provinsi dalam Kuadran III, dan 10 provinsi dalam Kuadran IV. Kuadran I menunjukkan wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang sama-sama tinggi dibandingkan *benchmark* nasional. Kuadran II menunjukkan wilayah dengan PDRB per kapita tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional. Kuadran III menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan PDRB per kapita masih di bawah *benchmark* nasional. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang sama-sama berada di bawah *benchmark* nasional.

Provinsi yang masuk di Kuadran I meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat. Sementara itu, provinsi yang masuk di Kuadran II meliputi Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Tengah. Adapun provinsi yang masuk di Kuadran III meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian, provinsi yang masuk di Kuadran IV meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun ringkasan hasil klasifikasi provinsi di Indonesia berdasarkan kuadran Matriks Tipologi Klassen adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Ringkasan Jumlah Provinsi Menurut Kuadran Matriks Tipologi Klassen.

Kuadran	Kategori	Jumlah Provinsi
I	Maju dan cepat tumbuh	5
II	Maju tetapi tertekan	7
III	Berkembang cepat	16
IV	Relatif tertinggal	10

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 4 diketahui bahwa mayoritas provinsi berada di Kuadran III, yaitu kelompok daerah berkembang cepat, dan sebanyak 10 provinsi berada pada Kuadran IV atau kelompok daerah yang terkategori relatif tertinggal. Kelompok provinsi di Kuadran IV tersebut yang selanjutnya menjadi objek analisis pada Matriks Tipologi Klassen tahap kedua untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan.

Analisis Tipologi Klassen Tahap Kedua

Pemilihan satu provinsi untuk dianalisis lebih lanjut pada tingkat sektoral dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya kesenjangan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita terhadap *benchmark* nasional. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai wilayah yang menjadi fokus analisis tahap kedua. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,22 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Sementara itu, PDRB per kapita Nusa Tenggara Barat sebesar Rp33,67 juta, dibandingkan dengan PDB per kapita nasional sebesar Rp83,70 juta.

Analisis tahap kedua selanjutnya dilakukan terhadap struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan 17 lapangan usaha. Masing-masing sektor diklasifikasikan berdasarkan dua indikator, yaitu laju pertumbuhan sektor dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kontribusi sektor terhadap PDRB dibandingkan dengan *benchmark* kontribusi sektoral. Berdasarkan kedua indikator tersebut, sektor-sektor ekonomi diklasifikasikan ke dalam empat kuadran, yaitu Kuadran I sebagai sektor unggulan/prima, Kuadran II sebagai sektor jenuh/tertekan, Kuadran III sebagai sektor potensial/berkembang, dan Kuadran IV sebagai sektor tertinggal.

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa struktur sektoral perekonomian Nusa Tenggara Barat terdiri atas karakteristik pertumbuhan dan kontribusi yang beragam. Sebanyak 6 sektor termasuk Kuadran I (unggulan/prima), 3 sektor termasuk Kuadran II (jenuh/tertekan), 7 sektor termasuk Kuadran III (potensial/berkembang), dan 1 sektor termasuk Kuadran IV (tertinggal). Tujuh sektor yang berada pada Kuadran III menjadi fokus utama analisis tahap kedua karena menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah, sementara kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah dibandingkan *benchmark* yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sektor-sektor yang sedang mengalami perkembangan dan masih memiliki ruang untuk meningkatkan peranannya dalam struktur ekonomi Nusa Tenggara Barat. Adapun sebaran sektor ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rinci dapat dilihat dalam Matriks Tipologi Klassen sektoral berikut.

Tabel 5. Matriks Tipologi Klassen Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2025.

Laju Pertumbuhan Sektor (g)	Kontribusi Sektor Tinggi (ski ≥ sk)	Kontribusi Sektor Rendah (ski < sk)
Pertumbuhan Cepat (gki ≥ gi)	Kuadran I Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Real Estat; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa lainnya.	Kudaran III Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan.
Pertumbuhan Lambat (gki < gi)	Kuadran II Pertambangan dan Penggalan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	Kuadran IV Informasi dan Komunikasi

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian (2026)

Pembahasan

Analisis Tipologi Klassen Tahap Pertama

Analisis hasil penelitian tahap pertama dioperasikan untuk melakukan klasifikasi makro terhadap 38 provinsi di Indonesia melalui persilangan indikator laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan pada koridor tahun 2024–2025. Hasil kalkulasi menggunakan parameter rata-rata nasional menunjukkan bahwa sebaran kinerja ekonomi regional terfragmentasi secara kontras, di mana sebanyak 5 provinsi masuk dalam Kuadran I, 7 provinsi dalam Kuadran II, 16 provinsi dalam Kuadran III, dan 10 provinsi berada di Kuadran IV. Wilayah yang menempati Kuadran I mencerminkan daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth, high income*) dengan kapasitas ekonomi makro serta tingkat kemakmuran yang sama-sama berada di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, wilayah yang teridentifikasi masuk ke dalam kategori Kuadran IV melambangkan daerah relatif tertinggal (*low growth, low income*) yang performa pertumbuhan ekonomi dan capaian PDRB per kapitanya masih terkendala di bawah *benchmark* nasional.

Sementara itu, Kuadran II menunjukkan wilayah maju tetapi tertekan (*high income, low growth*) dengan karakteristik pendapatan per kapita tinggi namun memiliki akselerasi pertumbuhan yang berada di bawah ritme pertumbuhan nasional. Adapun Kuadran III merepresentasikan wilayah berkembang cepat (*high growth, low income*) yang ditandai oleh lompatan pertumbuhan ekonomi yang sangat agresif meskipun akumulasi pendapatan per kapita masyarakatnya belum mampu melampaui garis rata-rata agregat nasional. Sebaran

spasial pengelompokan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan hasil analisis Klassen tahap pertama ini disajikan secara rigid pada tabel berikut.

Tabel 6. Matriks Hasil Analisis Klasifikasi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2024-2025.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (s)	PDRB per Kapita Tinggi ($y_i \geq y_n$)	PDRB per Kapita Rendah ($y_i < y_n$)
Pertumbuhan Tinggi ($s_i \geq s_n$)	Kuadran I Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat	Kuadran III Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat
	Kuadran II Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah	Kuadran IV Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan
Pertumbuhan Rendah ($s_i < s_n$)		

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian (2026).

Berdasarkan pemetaan spasial pada Tabel 6, posisi ekonomi regional Indonesia pada tahun 2024–2025 merefleksikan adanya fenomena anomali struktural yang didorong oleh kebijakan industrialisasi berbasis hilirisasi komoditas ekspor dan dampak fragmentasi administratif. Kehadiran Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara di Kuadran I secara empiris mengonfirmasi keberhasilan perluasan nilai tambah mineral nikel dan feronikel melalui koridor investasi padat modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi eksponensial sekaligus mengangkat posisi PDRB per kapita wilayah secara signifikan (Sjafrizal, 2018). Efek pengali dari industri hilir ini menciptakan penguatan kapasitas ekonomi lokal yang melampaui kinerja *benchmark* nasional.

Sebaliknya, pada Kuadran II, terdapat pola menarik di mana daerah kaya komoditas minyak bumi dan batu bara tradisional seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta Daerah Otonom Baru (DOB) kaya mineral seperti Provinsi Papua Tengah justru terjebak dalam kategori daerah maju tetapi tertekan. Realitas ini menjelaskan bahwa meskipun daerah-daerah tersebut memiliki basis PDRB per kapita yang sangat tinggi akibat ekstraksi sumber daya alam, laju pertumbuhan ekonomi mereka pada periode 2024–2025 mulai mengalami

perlambatan akibat volatilitas harga komoditas global serta adanya kejenuhan pada sektor-sektor primer non-olahan.

Fenomena yang tidak kalah kontras terlihat pada Kuadran III yang mendominasi lebih dari 42% total wilayah di Indonesia, di mana hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten) mengelompok secara solid sebagai daerah yang berkembang cepat. Karakteristik spasial ini menjelaskan bahwa meskipun aktivitas ekonomi pasca-transisi kepemimpinan nasional bergerak sangat progresif di pusat-pusat aglomerasi industri manufaktur dan jasa di Jawa, tekanan demografi berupa densitas penduduk yang masif menyebabkan pembagi PDRB per kapita daerah tetap berada di bawah rata-rata nasional (Todaro & Smith, 2020). Lompatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Kuadran III ini mencerminkan adanya efisiensi modal dan konektivitas infrastruktur yang matang, namun belum mampu bertransformasi secara instan menjadi peningkatan kesejahteraan per kapita akibat besarnya beban populasi.

Di sisi lain, fokus perhatian utama dalam penelitian ini tertuju pada 10 provinsi yang terperosok ke dalam Kuadran IV sebagai daerah relatif tertinggal. Selain wilayah kepulauan non-tambang konvensional di Indonesia Barat dan Tengah seperti Bengkulu, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat, Kuadran IV secara konsisten dihuni oleh entitas administrasi baru hasil pemekaran di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Penemuan empiris ini mempertegas relevansi teori *cumulative causation* dari Myrdal, di mana kebijakan desentralisasi melalui pembentukan DOB pada fase transisi 2024–2025 belum mampu memicu kemandirian ekonomi secara instan. Wilayah-wilayah konvensional dan DOB di Kuadran IV tersebut terbukti masih menderita akibat kuatnya efek penyerapan (*backwash effect*) modal ke pulau Jawa, keterbatasan infrastruktur konektivitas intra-wilayah, serta ketergantungan yang akut pada struktur ekonomi sektor pertanian ekstraktif berskala kecil yang lambat pertumbuhannya (Jhingan, 2012). Kondisi ketertinggalan makro pada 10 provinsi Kuadran IV inilah yang mendasari urgensi diperlukannya dekonstruksi analisis tahap kedua melalui pendekatan Klassen Sektoral untuk mencari katup penyelamat ekonomi lokal.

Analisis Tipologi Klassen Tahap Kedua

Hasil analisis Tipologi Klassen sektoral menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki sejumlah sektor yang tumbuh relatif cepat, tetapi belum memiliki kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian daerah. Pola tersebut tercermin dari keberadaan tujuh sektor pada Kuadran III, yaitu sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa

Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Perusahaan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kontribusi yang sebanding terhadap PDRB daerah. Kuadran III dapat dipandang sebagai kelompok sektor yang memiliki ruang pengembangan lebih lanjut karena telah menunjukkan dinamika pertumbuhan, tetapi peranannya dalam struktur ekonomi masih relatif terbatas. Langkah konkret yang dapat diambil dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial di Kuadran III agar naik kelas, dan memberikan perhatian serta kebijakan afirmatif pada sektor-sektor yang masih tertinggal (Saputro & Pradana, 2025).

Industri Pengolahan dan Konstruksi menunjukkan pentingnya penguatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proses produksi dan pembangunan wilayah. Posisi kedua sektor tersebut dalam Kuadran III menunjukkan bahwa pertumbuhannya relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi kontribusinya masih belum mencapai *benchmark* yang digunakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas pada kedua sektor tersebut belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan peranan dalam struktur PDRB daerah. Kedua sektor tersebut memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut agar pertumbuhan yang telah terbentuk dapat diikuti oleh peningkatan kontribusi ekonomi.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan juga berada dalam kelompok sektor potensial. Keberadaan kedua sektor tersebut dalam Kuadran III menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan mobilitas barang dan manusia serta kegiatan akomodasi dan konsumsi. Meskipun pertumbuhannya relatif tinggi, kontribusi kedua sektor tersebut masih berada di bawah *benchmark*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas sektoral tersebut masih memiliki peluang untuk diperluas sehingga dapat meningkatkan peranannya terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Pengadaan Listrik dan Gas berada pada Kuadran III dengan karakteristik pertumbuhan yang relatif tinggi namun kontribusi yang masih rendah. Posisi tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor pendukung aktivitas ekonomi tersebut sedang mengalami perkembangan, tetapi skala kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum sebesar sektor-sektor yang telah berada pada Kuadran I. Kondisi ini memberikan indikasi adanya ruang penguatan sektor jasa dan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Keberadaan tujuh sektor dalam Kuadran III menunjukkan bahwa NTB memiliki sektor-sektor yang tumbuh relatif cepat dan masih berpeluang meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Hal ini menjadi penting bagi wilayah yang pada tahap awal relatif tertinggal, karena

pengembangan sektor potensial dapat menjadi pijakan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Menurut Sjaifzal, sektor basis merupakan tulang punggung perekonomian daerah, sedangkan sektor nonbasis berfungsi sebagai penunjang sektor basis (Bruto et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor-sektor potensial dapat diarahkan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian dan memperkuat daya saing daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama dalam memetakan ketimpangan spasial nasional dan mendekonstruksi struktur ekonomi sektoral internal wilayah relatif tertinggal pada koridor transisi tahun 2024–2025. Hasil pengujian empiris tahap pertama menyimpulkan adanya polarisasi makro ekonomi yang nyata di antara 38 provinsi di Indonesia, dengan sebaran yang mengelompok ke dalam 5 provinsi di Kuadran I, 7 provinsi di Kuadran II, 16 provinsi di Kuadran III, dan 10 provinsi di Kuadran IV, di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat secara faktual terbukti berada pada Kuadran IV (Relatif Tertinggal) karena laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya masih tertahan di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, hasil analisis tahap kedua secara kritis menemukan adanya titik balik struktural yang optimis, di mana terdapat tujuh sektor lapangan usaha di Nusa Tenggara Barat yang menempati Kuadran III Sektoral (Sektor Potensial/Berkembang), yaitu Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Perusahaan, yang membuktikan bahwa wilayah ini memiliki *hidden engines of growth* berupa sektor-sektor non-basis yang melaju dengan pertumbuhan progresif namun belum terakumulasi secara optimal dalam kontribusi PDRB daerah. Generalisasi atas temuan ini wajib dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat karakteristik sektor potensial di Nusa Tenggara Barat sangat dipengaruhi oleh stimulasi eksternal berupa proyek strategis pariwisata nasional yang belum tentu merefleksikan kondisi riil di 9 provinsi Kuadran IV lainnya. Berdasarkan fakta-fakta empiris tersebut, rekomendasi tindakan nyata yang dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melakukan transisi dari kebijakan generik menuju kebijakan pendorong sektoral yang terarah (*sectoral targeted push policy*) melalui pengalokasian belanja modal daerah pasca-implementasi penuh UU HKPD serta skema kemudahan investasi daerah yang difokuskan untuk memperkuat ekosistem tujuh sektor potensial di Kuadran III, terutama sektor penopang pariwisata dan konektivitas seperti Sektor Transportasi serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki daya akselerasi tinggi. Intervensi afirmatif juga harus diarahkan pada penyediaan infrastruktur utilitas listrik-gas serta penguatan jasa keuangan

modern guna menyokong nilai tambah pada sektor Industri Pengolahan lokal agar mampu naik kelas menjadi sektor unggulan di masa depan. Di samping kontribusi yang dihasilkan, penelitian ini memiliki keterbatasan mendasar terkait cakupan horizon waktu analisis yang hanya memotret dinamika jangka pendek pada periode transisi tahun 2024–2025, serta belum mengintegrasikan variabel eksternal seperti volume investasi asing langsung (*FDI*) dan indeks pembangunan manusia di tingkat lokal, sehingga rekomendasi untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk memperluas horizon analisis menggunakan model data panel jangka panjang serta menerapkan kombinasi metode *Location Quotient* dan *Shift-Share* untuk menguji konsistensi daya saing sektor potensial tersebut secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2026). *Produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha 2021–2025* (Vol. 12). Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia 2020–2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bruto, R., Di, P., & Daerah, K. (2021). Analisis laju pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor pembentuk produk domestik tertinggal pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017–2019. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 6(1), 163–183. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.114>
- Dangi, V., & Rauf, A. (2023). Analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan typologi Klassen. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEMAI)*, 2(1), 45–58.
- Hardiani, H., & Lubis, A. (2017). Pemodelan status ketertinggalan perekonomian regional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 115–128.
- Himmah, L. F., & Utami, A. F. (2025). Identifikasi sektor basis dan sektor non-basis menggunakan metode Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), dan Tipologi Klassen terhadap pertumbuhan ekonomi. *Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 210–225.
- Jatmiko, B. (2021). Identifikasi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 89–102.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah: Sebuah panduan implementasi*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi kinerja penyaluran dana transfer ke daerah dan kemandirian fiskal*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025–2045*. Bappenas.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

- Pratama, R. A. (2022). Analisis spasial ketimpangan regional dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Wilayah*, 11(1), 34–47. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.14005>
- Rahayu, S., et al. (2023). Analisis tipologi Klassen dalam mengukur kemandirian ekonomi daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1720–1733.
- Saputro, R. Y., & Pradana, I. (2025). Analisis potensi sektor ekonomi unggulan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 112–125.
- Sjafrizal. (2018). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Suryana. (2019). *Ekonomi pembangunan: Tantangan dan pendekatan baru*. Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2014). *Perekonomian Indonesia: Kajian teoretis dan analisis empiris*. Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2019). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.